

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pelaksanaan pemilihan umum presiden dan wakil presiden (pilpres) pada tahun 2004 secara langsung menjadi dasar dari pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah (pemilukada) yang dilaksanakan secara langsung. Pemilu di Indonesia pada awalnya ditujukan untuk memilih anggota lembaga perwakilan, yaitu DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. Setelah amandemen keempat UUD 1945 pada tahun 2002, pemilihan presiden dan wakil presiden (pilpres) yang semula dilakukan oleh MPR, disepakati untuk dilakukan langsung oleh rakyat sehingga pemilihan presiden dan wakil presiden pun dimasukkan ke dalam pemilu. Pemilihan presiden dan wakil presiden sebagai bagian dari pemilu diadakan pertama kali pada Pemilu tahun 2004. Dan pada tahun 2007, berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (Pemilukada) juga dimasukkan sebagai bagian dari pemilu.

Sejak tahun 2005, bangsa Indonesia telah memasuki babak baru dalam pemilu yakni dengan diberlakukannya sistem yang berbeda pada pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung oleh masyarakat Indonesia, hal ini menunjukkan bahwa adanya kebebasan bagi masyarakat agar dapat menentukan pilihan untuk kepala daerah serta wakil kepala daerahnya sendiri tanpa ada paksaan dari pihak

manapun. Dalam UU No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah menyebutkan bahwa “Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat dengan asas langsung, umum, jujur, rahasia dan adil”. Berdasarkan kutipan UU No. 32 tahun 2004 itu jelas dinyatakan bahwa pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dilakukan dengan pemilihan secara langsung oleh masyarakat Indonesia melalui pemilihan umum yang telah diatur dalam UU tanpa ada paksaan dari pihak manapun termasuk dari calon atau kandidat yang mengikuti pemilukada.

Selanjutnya dalam UU No. 32 tahun 2004 Bab 1 pasal 1 ayat 20 disebutkan bahwa “Pasangan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah yang selanjutnya disebut pasangan calon adalah bakal pasangan pasangan calon yang telah memenuhi persyaratan untuk dipilih sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah”. Maka dapat dikatakan pemilihan kepala daerah secara langsung sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, merupakan suatu kemajuan dan pembaruan, pemilihan kepala daerah secara langsung akan menjadi babak penting dalam sejarah perpolitikan di Indonesia, dimana rakyat terlibat secara langsung dalam pemilihan pemimpinnya.

Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (Pemilukada) merupakan suatu perwujudan mekanisme demokratisasi di negara kita telah mencapai kedaerah-daerah dengan diselenggarakannya pemilihan kepala daerah secara langsung. Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (Pemilukada) secara langsung adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah propinsi dan kabupaten atau kota. Rakyat memiliki hak untuk

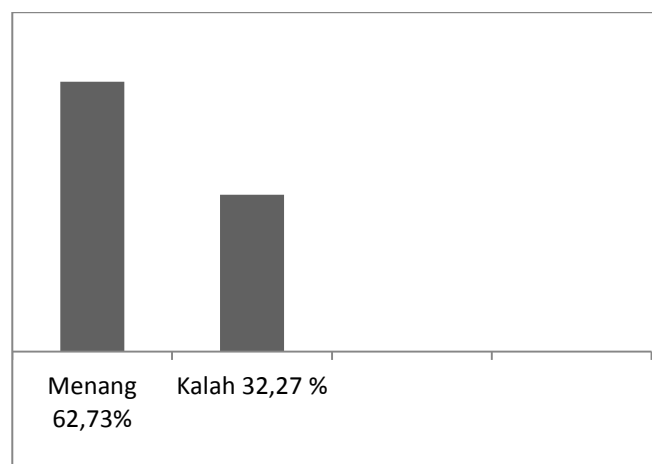
menentukan dan memilih secara langsung kepala daerah dan wakil kepala daerahnya masing-masing, artinya pada wilayah kabupaten, masyarakat dapat memilih calon bupati dan wakil bupati, pada wilayah kota, masyarakat dapat memilih calon walikota dan wakil walikota, dan dalam wilayah propinsi, masyarakat dapat memilih gubernur dan wakil gubernur. Pemilihan secara langsung tersebut tidak lepas dari kebijakan otonomi daerah yang diberikan oleh pusat kepada daerah.

Menurut fakta dari fenomena yang terjadi dalam pemilu, kepala daerah yang tengah memerintah (incumbent) masih mempunyai peluang lebih besar dalam memenangkan Pemilukada. Dari pelaksanaan Pemilukada hingga Desember 2006, sebanyak 62.2% kepala daerah incumbent yang maju dalam Pemilukada berhasil menang. Hampir semua provinsi ditandai dengan majunya kembali kepala daerah incumbent. Hanya di provinsi Papua, Maluku dan Nanggroe Aceh Darussalam banyak kepala daerah incumbent yang tidak ikut maju dalam Pemilukada. Posisi incumbent, menguntungkan bagi kandidat. Besarnya peluang kepala daerah terpilih kembali ini tidak bisa dilepaskan dari keuntungan yang didapat oleh kepala daerah, baik keuntungan langsung maupun tidak langsung. Keuntungan langsung yang didapat oleh kepala daerah yang tengah menjabat adalah dalam bentuk popularitas. Kepala daerah kemungkinan adalah orang yang paling dikenal oleh pemilih. Sementara keuntungan tidak langsung didapat oleh kepala daerah incumbent dari aktivitasnya sebagai kepala daerah. Kunjungan ke daerah, mengunjungi rumah masyarakat hingga meresmikan

sebuah proyek pembangunan dapat dibungkus sebagai kampanye untuk memperkenalkan diri kepada masyarakat.

Dalam sebuah jurnal yang diterbitkan oleh Lingkaran Survei Indonesia (LSI) mencatat, bahwa: kepala daerah incumbent yang maju kembali sebagai calon kepala daerah dalam Pemilukada (230 orang). Mereka yang menang dan terpilih kembali 143 orang (62,17%), sedangkan incumbent yang lunglai atau kalah hanya 87 orang (37,83%). Keunggulan incumbent yang terlihat mencolok pada pemilukada Kabupaten/Kota, yakni menang 62,73% dan yang kalah 32,27%. Sedangkan pada pemilukada provinsi hasilnya berimbang yakni yang menang 50% dan kalah 50%.

Gambar 1.1 Persentase Keberhasilan Kepala Daerah Incumbent yang Maju Sebagai Calon Kepala Daerah Dalam Pilkada Kabupaten/Kota



Keterangan: Data didasarkan dari 230 kepala daerah incumbent yang ikut maju dalam Pemilukada (Juni 2005-Desember 2006). Sumber: Diolah dari database Pilkada Lingkaran Survei Indonesia.

Sementara itu pesta demokrasi pemilihan kepala daerah langsung di Kabupaten Demak yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Demak pada tanggal 9 Desember 2015 yang lalu, menyediakan tiga nama bakal calon yang telah lolos menjadi calon Bupati

dan Wakil Bupati yang diusung dan didukung oleh partai-partai politik untuk dapat bersaing memenangkan pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah di Kabupaten Demak, dimana dua dari ketiga nama pasangan calon merupakan petahana (*incumbent*). Ketiga nama calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Demak adalah:

1. H M Natsir dan Drs. Joko Sutanto
2. H. Moh. Dachirin Said, SH, M.Si dan H Edi Sayudi, ST
3. Drs. Harwanto dan H. Maskuri, S.Ag

Pada pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang secara langsung tersebut mengharuskan para kandidat atau calon kepala daerah dan wakil kepala daerah menyiasati strategi-strategi yang tepat agar dapat mempengaruhi pilihan politik masyarakat Kabupaten Demak sehingga mendapatkan dukungan dan keluar sebagai pemenang dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di Kabupaten Demak.

Apabila berbicara mengenai pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah (Pemilukada) maka hal ini tentu tidak lepas dari adanya persaingan antara masing-masing kandidat dalam berupaya meraih dukungan dari pemilih yang dalam hal ini adalah masyarakat. Banyak faktor yang akan mempengaruhi menang atau kalahnya pasangan calon pada suatu pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah, baik itu faktor internal yang dalam hal ini adalah partai serta kandidat yang diusung, maupun faktor eksternal yaitu masyarakat selaku pemilih. Dalam hal ini pilihan politik pemilih merupakan hal yang penting untuk diperhatikan oleh masing-masing kandidat karena hal ini akan saling berkaitan dengan bagaimana strategi pemenangan yang akan dilakukan oleh masing-masing

kandidat dengan tujuan tentunya agar dapat memperoleh suara sebanyak mungkin dari pemilih. Sehubungan dengan sebutan Demak Kota Wali maka calon kandidat berupaya merebut hati masyarakat Kabupaten Demak melalui pencitraan ke-islamian yang disampaikan pada kampanye-kampanye politik diharapkan dapat mewakili aspirasi masyarakat.

Faktor internal merupakan faktor yang cukup mempengaruhi menang atau kalahnya kandidat dalam suatu pemilihan adalah bagaimana partai serta kandidat yang diusung tersebut mampu menarik simpati masyarakat yaitu dengan melakukan pemasaran politik yang ideal. Sekarang ini politik di Indonesia jauh lebih terbuka dan transparan, masyarakat pun semakin kritis dalam melihat permasalahan politik yang terjadi. Masyarakat yang saat ini sudah semakin kritis terhadap dunia politik di Indonesia menuntut para kandidat untuk melakukan pendekatan yang lebih persuasif dalam melakukan komunikasi politik yang tentunya dilakukan dengan cara yang lebih tepat dan relevan agar dapat tertanam dibenak masyarakat. Tidak dapat dipungkiri, peran penentu dalam pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung tergantung pada pemilih yang mana dalam hal ini adalah masyarakat. Karena pada akhirnya siapapun pemenang dalam Pemilu nanti merupakan kemenangan rakyat. Rakyat akan berharap banyak agar kepala daerah mereka dapat mewakili aspirasi masyarakat Kabupaten Demak.

Sehingga hal ini akan membuat persaingan yang semakin tinggi diantara para kandidat, termasuk dalam melakukan komunikasi politik yang menjadi semakin kuat dan berkala dilakukan oleh para pasangan calon.

Maka komunikasi politik memiliki peran yang cukup penting bagi masing-masing kandidat dalam menyampaikan citra positif masing-masing pasangan calon kandidat kepada masyarakat. Dimana dengan adanya komunikasi politik yang dilakukan secara ideal maka partai politik ataupun kandidat pasangan calon dapat menyusun strategi-strategi apa saja yang nantinya akan dilakukan. Dengan melakukan komunikasi politik yang ideal maka akan memberikan manfaat bagi partai politik ataupun kandidat dalam membangun hubungan dengan pemilih, tentu saja para kandidat berharap akan mendapatkan dukungan dari masyarakat dalam bentuk suara pada pemilu yang akan dilaksanakan.

Maka dari itu komunikasi politik merupakan hal yang sangat penting dilakukan dalam suatu pemilihan karena dapat membantu efektifitas penyusunan produk politik, serta dapat menyampaikan produk politik tersebut secara luas kepada masyarakat. Komunikasi politik akan membawa manfaat baik itu bagi partai politik ataupun kandidat pasangan calon karena dengan adanya komunikasi politik hubungan mereka dengan pemilih akan terbangun dan secara tidak langsung dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Selain itu, dengan adanya komunikasi politik yang dilakukan, masyarakat sebagai pemilih akan dapat lebih mengetahui produk politik serta program kerja apa yang akan dijalankan oleh para kandidat apabila terpilih.

Faktor eksternal juga merupakan hal yang tidak kalah penting untuk diperhatikan oleh suatu partai politik maupun kandidat dalam menyampaikan produk politik kepada masyarakat, mengingat masyarakat

saat ini semakin cerdas dan kritis maka perlu adanya kesiapan yang matang dalam menyampaikan program politik pasangan calon agar apa yang disampaikan tersebut dapat membuat masyarakat tertarik dan kemudian memilih kandidat yang bersangkutan. Tidak dapat dipungkri bahwa menang atau kalahnya calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam pemilihan umum kepala daerah tergantung pada pilihan politik pemilih dalam menentukan pasangan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang bagaimana yang nantinya akan dijadikan pilihan oleh masyarakat Kabupaten Demak. Dalam pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Demak setiap calon atau kandidat menginginkan pencapaian yakni sebagai pemenang dan menjadi orang nomor satu di Kabupaten Demak, akan tetapi pada akhirnya keputusan tetaplah berada di tangan masyarakat Kabupaten Demak itu sendiri dalam memilih dan menentukan kepala daerah dan wakil kepala daerahnya.

Pada tanggal 9 Desember 2015 telah diadakan pemilihan tersebut, terdapat 3 paslon yang keseluruhan terdiri dari jalur partai politik. Kandidat Bupati dan Wakil Bupati Demak diikuti oleh nama-nama tokoh politik lama seperti H. Moh. Dachirin Said, SH, M.Si (petahana bupati), Drs. Harwanto (petahana wakil bupati), Maskuri (Ketua Partai Gerindra) serta beberapa nama baru yang ikut dalam Pemilukada Demak tahun 2015. Berikut nama-nama pasangan calon beserta rekapitulasi hasil suara sah;

Tabel 1.1

Hasil Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2015

No	Nama Pasangan Calon	Hasil Perolehan Suara	Prosentase (%)
1.	H M Natsir dan Drs. Joko Sutanto (PPP, Partai Golkar, PDIP)	309.251	54,2
2.	H. Moh. Dachirin Said, SH, M.Si dan H Edi Sayudi, ST (PKB dan Partai NasDem)	163.530	28,6
3.	Drs. Harwanto dan H. Maskuri, S.Ag (Partai Gerindra, PKS, PAN, Partai Demokrat)	97.104	17

(Sumber : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Demak Tahun 2015 oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak)

Menurut hasil rekapitulasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Demak, suara terbanyak diraih oleh pasangan H.M Natsir dan Drs. Joko Sutanto yang meraih 309.251 suara. Hasil tersebut berdasarkan rekapitulasi dari 569.885 suara sah. KPUD Demak juga telah menetapkan pemilihan satu putaran. Proses pemilihan dilakukan di tempat pemungutan suara (TPS) sebanyak 1.757 yang tersebar 249 Desa di 14 kecamatan. Pasangan H.M Natsir dan Drs. Joko Sutanto memperoleh kemenangan telak di seluruh kecamatan yang terdapat di Kabupaten Demak yang berjumlah 14 kecamatan, 14 kecamatan tersebut adalah Kecamatan Demak, Kecamatan

Wonosalam, Kecamatan Dempet, Kecamatan Kebonagung, Kecamatan Mijen, Kecamatan Sayung, Kecamatan Gajah, Kecamatan Karanganyar, Kecamatan Guntur, Kecamatan Karangtengah, Kecamatan Bonang, Kecamatan Wedung, Kecamatan Mranggen, dan Kecamatan Karangawen. Perolehan suara tersebut menunjukkan peran aktif sebuah tim pemenangan dan dukungan partai politik sebagai organisasi politik yang sudah memiliki jaringan sampai ke level akar (*grass root*). Partai politik memiliki sumber daya seperti jaringan, sumber daya manusia (SDM), citra maupun strukturnya sampai tingkat yang terbawah. Partai sebagai aset strategis dalam menggerakkan mesin politik serta menjalankan strategi dan program pemenangan.

Partai pengusung pasangan Muhammad Natsir dan Joko Sutanto adalah Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Golongan Karya (Golkar), sedangkan partai pendukung adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Ketiga partai tersebut merupakan partai besar di Kabupaten Demak, terbukti dengan elektabilitas dan kualitas partai yang selalu menduduki jabatan struktural legislatif di Kabupaten Demak. Selain itu, koalisi partai politik tersebut juga mempunyai jumlah pendukung atau basis massa yang besar.

Keberhasilan koalisi partai politik pasangan Muhammad Natsir dan Joko Sutanto mampu mengungguli dua pasangan calon lainnya yang merupakan petahana (*incumbent*) menjadi menarik untuk diteliti. Hal ini menunjukkan bahwa persaingan pada Pemilukada Kabupaten Demak cukup berimbang dan kompetitif. Memenangkan pemilu berarti mendapatkan suara

pemilih dengan jumlah terbanyak. Hal ini membuat pembahasan dalam penelitian ini akan terfokuskan pada strategi pemenangan pasangan Muhammad Natsir dan Joko Sutanto.

Strategi pemenangan penting untuk bisa memahami cara berfikir dan bertindak pemilih, yang pada akhirnya mereka akan memilih partai politik atau kandidat. Hal tersebut sangat krusial pada pemahaman yang logis untuk mengambil keputusan. Kalau dulunya pemilih lebih terikat memilih karena ideologi saja, tetapi sekarang fokus pemilih pada logika yang kritis dalam program yang di janjikan untuk memilihnya. Berdasarkan fakta agar mampu bersaing di ajang pilukada harus mempunyai kendaraan politik yaitu partai yang mengusung maupun yang mendukung.

Pada penelitian ini mempunyai persamaan dan perbedaan, persamaannya yaitu ketiga pasangan calon melalui jalur politik bukan independen, dan perbedaan terletak pada partai pengusung dan pendukung setiap calon yang berbeda. Hal tersebut menunjukkan demokrasi yang ada di Kabupaten Demak berjalan dengan baik dan kompetitif. Fakta yang menarik, popularitas tinggi sebagai petahana (*incumbent*) tidak menjadi jaminan mendapat suara tertinggi. Fakta lainnya yaitu koalisi besar partai politik belum tentu meraih kemenangan, namun disisi lain tanpa dukungan partai politik akan sulit bersaing. Dilihat dari beberapa fakta tersebut, pasangan Muhammad Natsir dan Joko Sutanto yang diusung Partai Golkar dan PPP serta didukung Partai PDIP berhasil meraih suara terbanyak dan mengungguli pasangan lainnya yang diusung tiga partai politik dan satu partai pendukung, serta mengalahkan pasangan petahana.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis termotivasi guna melaksanakan pengkajian tentang “Strategi Pemenangan Pasangan Muhammad Natsir dan Wakilnya Joko Sutanto pada Pemilu Kabupatn Demak Tahun 2015”.

1.2 Rumusan Masalah

Sesuai dengan uraian latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, sehingga permasalahan yang dirumuskan pada penelitian ini yaitu:

- 1.2.1 Bagaimanakah strategi komunikasi politik yang dilakukan pasangan Muhammad Natsir dan Joko Sutanto dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Demak tahun 2015?
- 1.2.2 Faktor-faktor apa yang mempengaruhi kemenangan pasangan Muhammad Natsir dan Joko Sutanto terhadap pasangan lainnya pada pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Demak tahun 2015?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk menemukan penyebab mengenai fenomena tertentu, Adapun tujuan lain dari penelitian ini adalah:

- 1.3.1 Untuk menjelaskan strategi komunikasi politik yang digunakan pasangan Muhammad Natsir dan Joko Sutanto pada Pemilu Kabupatn Demak Tahun 2015.
- 1.3.2 Untuk menjelaskan faktor kemenangan pasangan Muhammad Natsir dan Joko Sutanto dalam Pemilu Kabupatn Demak Tahun 2015.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Pada penelitian, adanya manfaat, menambah pengetahuan di kalangan akademisi, praktisi dan masyarakat umum untuk menambah pengetahuan dalam pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah.

1.4.2 Manfaat Praktis

Diharapkan mempunyai kegunaan bagi partai, hal ini berkaitan dengan strategi dan komunikasi. Serta menjadi bahan kajian bagi partai politik dalam menciptakan kesinambungan fungsi dan peran sosial politiknya ditengah masyarakat.

1.5 Kerangka Pemikiran Teoritis

1.5.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari penelitian terdahulu, penulis tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti judul penelitian penulis. Namun penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian penulis. Berikut merupakan penelitian terdahulu berupa beberapa jurnal yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan penulis.

Pertama, Aulia Adriansyah (2020) dari Universitas Diponegoro melakukan penelitian terhadap strategi pemenangan yang dilakukan oleh

pasangan Ganjar Pranowo dan Taj Yasin pada pemilihan gubernur Jawa Tengah pada tahun 2018.¹

Dari penelitian yang berjudul “Analisis Strategi Pemenangan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Realisasi Target Pemenangan Ganjar Pranowo – Taj Yasin Maimoen pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah tahun 2018” diketahui peran pasangan petahana (*incumbent*) memberi pengaruh yang cukup besar untuk meraih sebuah kemenangan pada ajang pemilukada.

Akan tetapi, meskipun pengaruh petahana sangatlah besar guna meraih kemenangan, namun pada kenyataannya pengaruh pasangan petahana tidak selalu menentukan sebuah kemenangan melainkan dengan strategi yang digunakan.

Dengan demikian penelitian ini memiliki kesamaan yaitu mengkaji strategi pemenangan pada ajang pemilukada dan penelitian menggunakan metode penelitian kuantitatif.

Kedua, Khoiron (2015) dari Universitas Islam Malang melakukan penelitian terhadap kemenangan pasangan petahana (*incumbent*) pada pilkada Surabaya tahun 2015.

Dari penelitian yang berjudul “Kemenangan petahana (*incumbent*) pada pilkada 2015 di Kota Surabaya dan Kabupaten Malang: Strategi

¹ Aulia Adriansyah, “Analisis Strategi Pemenangan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Realisasi Target Pemenangan Ganjar Pranowo – Taj Yasin Maimoen pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah tahun 2018”, *Journal of Politics and Government Studies*, Vol 9 No 4, Tahun 2020

Politik dan Marketing Politik” diketahui peran pasangan petahana (*incumbent*) memberi pengaruh yang cukup besar untuk meraih sebuah kemenangan pada ajang pemilu.

Akan tetapi, meskipun pengaruh petahana sangatlah besar guna meraih kemenangan, namun pada kenyataannya pengaruh pasangan petahana tidak selalu menentukan sebuah kemenangan melainkan dengan strategi yang digunakan.

Dengan demikian penelitian ini memiliki kesamaan yaitu mengkaji strategi kemenangan pada ajang pemilu dan penelitian menggunakan metode penelitian kuantitatif.

1.5.2 Strategi

Bryson secara sederhana mendefinisikan strategi sebagai “a plan to achieve mission and meet the mandates” atau suatu rencana untuk meraih misi dan melaksanakan mandat. Strategi merupakan suatu pola tujuan, kebijakan, dan program kegiatan. Keputusan maupun pengalokasian sumber daya yang menentukan apa organisasi itu, apa yang dikerjakan, dan mengapa ia melakukan itu. Dengan demikian strategi merupakan pengembangan dari misi organisasi yang menghubungkan organisasi itu dengan lingkungannya, sehingga strategi merupakan outline respon organisasi terhadap tantangan-tantangan mendasar yang dihadapi.

Lebih lanjut strategi merupakan suatu rencana untuk mencapai tujuan tertentu yang disusun sedemikian rupa oleh suatu organisasi sesuai dengan misi yang hendak diraihnya, sekaligus untuk melaksanakan mandat

atau tugas-tugas yang diembannya dengan mempertimbangkan faktor-faktor lingkungan eksternal maupun internal.

Sebagai sebuah rencana, maka strategi tidak dengan sendirinya akan mampu meraih apa yang diharapkan begitu selesai disusun. Faktor implementasi dari strategi itulah yang mempengaruhi keberhasilan strategi tersebut. Sebaik apapun suatu strategi tidak akan berhasil apabila jelek dalam menjalankan atau mengimplementasikannya. Sebaliknya, apabila biasa-biasa saja suatu strategi disusun, namun bagus dalam melaksanakannya, niscaya akan berhasil strategi tersebut. Hal ini diilustrasikan oleh Bryson² sebagai berikut: *General strategy will if specific steps to implement them are absent. Further are prone to failure if there is no consistency between what an organization says, what it pays for, and what it does.*

Dari pertanyaan tersebut, disimpulkan bahwa keberhasilan suatu strategi diperlukan konsistensi antara strategi dan implementasi. Strategi bukan merupakan pedoman kaku (rigid) bagi implementasi, karena filosofi penyusunan strategi adalah sebagai jembatan organisasi dengan lingkungannya, sehingga tetap dimungkinkan adanya suatu fleksibilitas yang adaptif namun tetap relevan.

Dengan definisi strategi tersebut di atas, maka pada dasarnya setiap organisasi memiliki strategi dalam mewujudkan tujuan organisasi. Strategi dalam organisasi berpengaruh terhadap tujuan, kebijakan, program, kegiatan, keputusan-keputusan dan pengalokasian sumber daya organisasi.

² H. M, Bryson, Perencanaan Strategi Bagi Organisasi (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), hal. 130.

Suatu strategi yang afektif harus memenuhi beberapa kriteria seperti yang dinyatakan oleh Bryson³:

1. Strategi secara teknis harus dapat dikerjakan.
2. Strategi secara politis dapat diterima oleh para keystakeholders.
3. Strategi harus sesuai dengan filosofi dan nilai-nilai organisasi.
4. Strategi bersifat etis, moral, legal dan merupakan keinginan organisasi untuk menjadi baik.
5. Strategi harus sesuai dengan isu strategi yang hendak dipecahkan.

Seperti dikemukakan sebelumnya, bahwa strategi bagi suatu organisasi terdiri dari sub-sub sistem, yang tentunya masing-masing memerlukan strategi pencapaiannya.

1.5.3 Pemilukada

Menurut Rahman⁴, pemilihan umum merupakan pasar politik atau tempat terjadinya interaksi yang dimana suatu individu/masyarakat melakukan kontrak sosial (perjanjian masyarakat) antara peserta pemilihan umum (partai politik) dengan pemilih (rakyat) yang memiliki hak pilih. Calon pasangan kepala daerah dalam meyakinkan pemilih akan melakukan beberapa aktivitas politik seperti kampanye, propaganda, iklan politik dengan media massa cetak, audio, serta audio visual (spanduk, pamflet, selebaran). Terkadang calonn pasangan tersebut dapat melakukan

³ Ibid

⁴ A.Rahman H.I, *Sistem Politik Indonesia* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), hlm. 147

komunikasi pribadi secara tatap muka (*lobby*) dengan masyarakat guna menyampaikan pesan seperti rencana program, asas, *platform*, ideologi serta janji-janji politik lainnya. Aktivitas tersebut dilakukan agar pemilih dapat menentukan pilihannya untuk mewakili dalam badan legislatif maupun eksekutif.

Pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) secara langsung yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah yang mengatur pemilihan langsung kepala daerah (pemilukada). Peraturan Undang-Undang yang mengatur tentang pemilukada sesuai dengan UUD 1945 pada perubahan pertama yang terdapat dalam Pasal 22E UUD Tahun 1945 yang menjelaskan bahwa untuk pemilihan kepala daerah baik pada tingkat Gubernur, Bupati, Walikota, serta Wakilnya dipilih dengan melaksanakan pemilihan secara langsung setiap 5 tahun sekali oleh masyarakat di daerahnya. Pemilukada berasaskan pada langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Pemilihan umum berasaskan pada langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Berdasarkan asas tersebut, pelaksanaan pemilukada di Indonesia telah melaksanakan prinsip-prinsip yang berlaku umum dalam menentukan pejabat publik atau pejabat politik secara terbuka. Menurut Joko J Prihatmoko⁵ menjelaskan pengertian dari asas tersebut, yaitu :

- 1) Langsung: Rakyat sebagai pemilih memiliki hak untuk memilih secara langsung tanpa adanya paksaan dan sesuai dengan kehendak dari hati nurani.

⁵Joko J. Prihatmoko, *Pemilihan Kepala Daerah Langsung* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 207-208

- 2) Umum: Setiap warga negara yang telah memenuhi syarat dan ketentuan perundangan memiliki hak untuk memilih pada pemilukada. Pemilihan yang berdasarkan pada umum memiliki arti bahwa setiap warga negara memberikan kesempatan kepada seluruh rakyat tanpa adanya diskriminasi antara suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan, dan status sosial.
- 3) Bebas: Rakyat sebagai pemilih bebas memilih tanpa adanya tekanan dan paksaan dari siapapun. Setiap warga negara dijamin keamanannya untuk melaksanakan haknya sehingga dapat memilih sesuai dengan keinginan, hati nurani dan kepentingannya.
- 4) Rahasia: Setiap warga negara dalam memberikan hak suaranya akan dijamin pilihannya tersebut tidak akan diketahui oleh pihak siapapun, manapun dan melalui jalan manapun. Pemilih dapat memberikan suaranya pada surat suara yang tidak dapat diketahui siapapun atas pilihannya.
- 5) Jujur: Selama proses pelaksanaan pemilihan umum, setiap penyelenggara, aparat pemerintah, pengawas, calon pemilukada, pemilih serta seluruh pihak yang terlibat dalam pemilihan umum diwajibkan untuk melaksanakan pemilihan umum secara jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 6) Adil: Selama proses pelaksanaan pemilihan umum, setiap calon dan pemilih dalam pemilukada akan memperoleh perlakuan yang sama dan bebas dari kecurangan dari pihak manapun.

Pelaksanaan pemilu adalah bagian dari kelanjutan kelembangaan demokratisasi, mengingat demokrasi ditingkat lokal (daerah) merupakan pondasi krusial bagi adanya pembangunan demokrasi nasional. Terlebih keterlibatan rakyat secara langsung pada proses demokrasi, merupakan sebuah usaha perbaikan mutu pondasi demokratisasi di tingkat daerah hingga nasional.

1.5.4 Komunikasi Politik

1.5.4.1 Strategi Komunikasi Politik

Arifin mengidentifikasi, tahap selanjutnya yang dilakukan tim pemenangan yaitu perumusan komunikasi politik yang terkandung pesan kampanye didalamnya, yaitu terkait dengan keputusan dan tindakan yang dijalankan saat ini, untuk meraih tujuan politik di masa yang akan datang.⁶

Menurut Ardial, hakikat strategi dalam komunikasi politik adalah keseluruhan keputusan kondisional yang dijalankan guna mencapai tujuan politik pada masa depan. Ketika komunikasi politik berlangsung, justru yang berpengaruh bukan saja pesan politik, melainkan terutama siapa tokoh politik (politikus) atau tokoh aktivis dan profesional dari lembaga mana yang menyampaikan pesan politik itu. Dengan kata lain, ketokohan seorang komunikator politik dan lembaga politik yang mendukungnya sangat menentukan berhasil atau tidaknya komunikasi politik dalam mencapai sasaran dan tujuannya.⁷

⁶Arifin, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 125

⁷ Ardial, *Komunikasi Politik* (Jakarta Barat:PT: Indeks), hlm. 73

Pemahaman yang sama antara kandidat dan masyarakat akan membentuk sebuah opini positif dimasyarakat, Menurut Heryanto dan Rumaru⁸, opini memiliki beberapa proses yang dikenal dengan kontruksi, yaitu sebagai berikut;

- 1) Kontruksi personal, opini berupa pengamatan dan interpretasi atas sesuatu secara sendiri-sendiri dan subjektif.
- 2) Kontruksi sosial,
 - a. Opini kelompok adalah opini pribadi yang diangkat dalam suatu kelompok tertentu.
 - b. Opini rakyat adalah opini yang tersistematisasikan melalui jalur yang bebas, seperti pemilihan umum atau hasil *polling*.
 - c. Opini massa adalah opini yang berserakan, ini bisa berbentuk budaya. Inilah yang disebut oleh para politikus dengan opini publik.
- 3) Kontruksi politik adalah ketiga hasil kontruksi sosial dihubungkan dengan kegiatan pejabat publik yang mengurus masalah kebijakan umum. Inilah opini publik yang dikaji dalam komunikasi politik.

Firmanzah⁹ mengatakan pada fakta yang ada dilapangan, penyampaian pesan tidak semuanya tersampaikan. Hal ini karena adanya gangguan. Gangguan dalam komunikasi politik seringkali mengaburkan esensi pesan yang disampaikan. Gangguan bisa disebabkan oleh serangan

⁸Heryanto, Gun Gun dan Shulhan Rumaru, *Komunikasi Politik (Sebuah Pengantar)* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2013), hlm. 62

⁹Firmanzah, *Marketing Politik: Antara Pemahaman dan Realitas* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007), hlm. 190-191

lawan politik, pemilihan media kurang tepat, pembengkokan pesan oleh media. Pada saat pengirim menginginkan kesamaan pemahaman atas pesan simbolik yang disampaikan si penerima pesan cenderung untuk mengartikan secara berbeda. Masyarakat dalam hal ini mempunyai *frame of reference* atau kerangka acuan yang berbeda dengan partai politik. *Frame of reference* bisa dipengaruhi oleh riwayat, pengalaman hidup, pekerjaan, sistem nilai dan norma, beberapa perbedaan itulah yang membuat masing-masing individu berbeda dalam berfikir dan mengambil sikap. Oleh karena itu, partai politik perlu melakukan segmentasi dipakai pada penyusunan program, dengan cara berhubungan tanpa kesulitan dengan program kerjanya.

Arifin¹⁰ mengatakan, langkah melakukan strategi komunikasi yaitu dengan merawat ketokohan, memantapkan lembaga politik, menciptakan kebersamaan dan membangun konsensus merupakan strategis yang tepat bagi komunikator politik. Langkah-langkah melakukan strategi komunikasi politik agar berjalan efisien dan efektif dijelaskan pada tabel berikut.

¹⁰ Arifin, Anwar, *Komunikasi Politik (Filsafat-Paradigma-Teori-Tujuan-Strategi dan Komunikasi Politik Indonesia)* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hlm. 235

Tabel 1.2
Strategi Komunikasi Politik

Strategi	Penjelasan
A. Ketokohan dan Kelembagaan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Merawat ketokohan Ketokohan adalah orang yang memiliki kredibilitas (<i>al amin</i>), daya tarik, dan kekuasaan sebagai etos, yaitu gabungan antara kredibilitas, atraksi dan kekuasaan. Orang yang memiliki ketokohan dapat disebut juga sebagai Pahlawan Politik. Utamanya mempertahankan kredibilitas, atraksi dan kekuasaan. Strategi dalam komunikasi politik adalah keseluruhan keputusan kondisional tentang tindakan yang akan dijalankan saat ini, guna mencapai tujuan politik pada masa depan. Oleh karena itu, merawat ketokohan dan memantapkan lembaga politiknya merupakan keputusan strategis untuk mencapai tujuan politik dalam memenangkan pemilihan umum. Setiap keputusan dalam perencanaan strategi tentunya melihat kondisi sosial masyarakat yang terjadi pada saat itu 2. Memantapkan kelembagaan Citra diri partai politik adalah sesuatu yang dipercaya dan diharapkan oleh rakyat tentang apa saja yang dilakukan. Partai politik harus solid dan harmonis dalam memainkan peran sebagai penengah dan menerjemahkan aktivitas politik kepada khalayak. Konsolidasi partai politik dari pusat sampai anak cabang harus dilakukan untuk menunjukkan partai politik selalu prima ditunjukkan melalui ketokohan kader politik dan pelayanan kepada rakyat.
B. Menciptakan kebersamaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memahami khalayak, Memahami budaya, agama, dan ideologi dalam tiap-tiap wilayah. 2. Menyusun pesan persuasif, Pesan yang disampaikan sesuai dengan kondisi dan karakteristik penerima. 3. Menetapkan metode, Metode yang dapat dipilih sesuai kondisi masyarakat, yaitu: <ol style="list-style-type: none"> 1) pengulangan pesan politik,

-
- 2) meneliti pengaruh kelompok terhadap individu,
 - 3) pesan berisi fakta,
 - 4) membujuk,
 - 5) pesan berisi pendapat, fakta, pengalaman dan,
 - 6) memaksa.

4. Memilih media,

Pemilihan media disesuaikan dengan kondisi masyarakat, yakni:

- 1) *visual media* (koran, poster, spanduk),
- 2) *auditive media* (radio),
- 3) *audio visual media* (televisi, film),
- 4) media interaktif internet.

C. Membangun konsensus

1. Seni berkompromi,
Bakat bawaan lahir para politikus. Seni berkompromi tidak boleh berfikir matematis dan normatif saja. Selalu membuka peluang untuk berkompromi atau membangun konsensus. Tidak ada lawan dan kawan abadi didalam politik, yang ada hanya kepentingan.
 2. Bersedia membuka diri,
Mengembangkan seni berkompromi misalnya dengan cara lobi.
-

Setelah memahami langkah dalam melakukan strategi komunikasi politik ada beberapa bentuk komunikasi yang dapat digunakan sesuai dengan kondisi dan kebutuhannya.

1.5.8 Kerangka Berfikir

Dalam sebuah pertarungan pemilihan umum kepala daerah, tentunya partai politik telah menyiapkan strategi untuk memenangkan pasangan calon. Semua partai politik akan melasanakannya, mengenalkan dan memberikan informasi tentang kandidat kepada masyarakat. Pertama kali yang dibutuhkan partai politik untuk membedakan pasangan calon mereka dengan pasangan calon lain yaitu membangun sebuah konstruksi *image*. Selain itu, *image* juga terkait erat dengan karakteristik masyarakat daerah yang bersangkutan. Pembentukan *image* berdampak pada pendapat sekaligus menyebarkan pemaknaan, hal tersebut tidak dapat dilakukan tanpa adanya komunikasi politik.

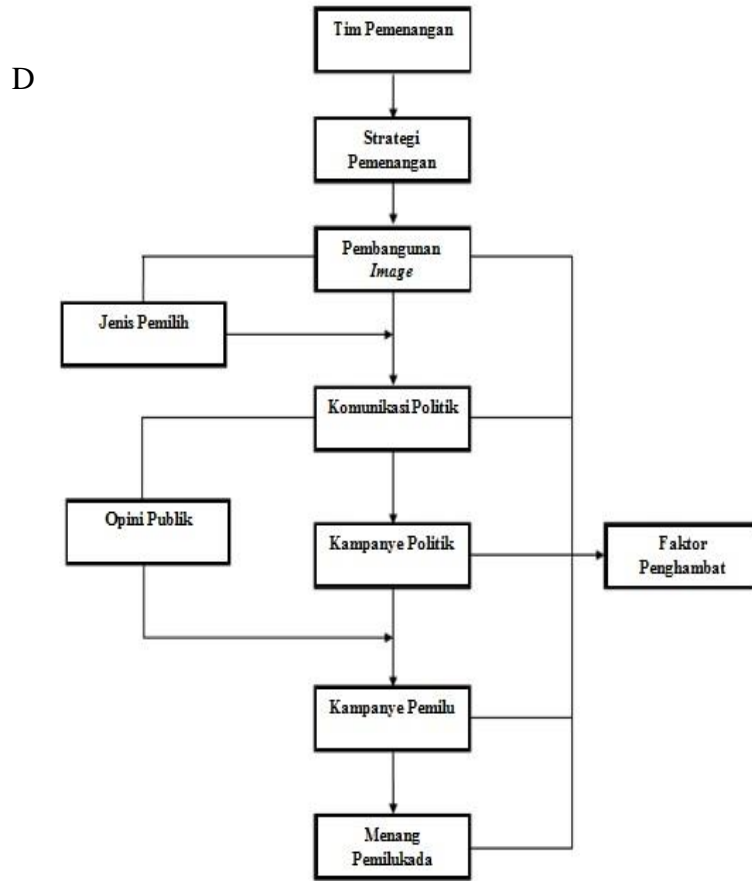
Komunikasi politik dilakukan oleh partai politik untuk mengirim sekaligus menerima umpan balik tentang isu yang ada di dalam masyarakat. Isu politik ini akan memperkuat *image* pasangan calon, isu tersebut dapat berupa ideologi partai, program kerja partai, figur pemimpin partai, visi misi partai, dan permasalahan yang diungkapkannya. Tanpa adanya *blueprint* yang jelas partai politik akan mudah terombang-ambing oleh arus yang berkembang belaka. Pada tahap tersebut akan masyarakat akan mulai terlihat kritis terhadap pasangan calon. Pembentukan harus dilakukan oleh partai politik, dengan menyelenggarakan pola kampanye politik yang tepat. Masyarakat tidak hanya menilai pasangan calon pada

janji dan harapan pada periode kampanye pendek saja, namun akan merekam reputasi politiknya dimasa lalu. Kampanye politik mempunyai jangka waktu yang panjang, dalam hal ini kampanye pemilu hanya menjadi bagian kecil dari kampanye politik. Kampanye politik lebih menguatkan *image* pasangan calon, sedangkan tahap selanjutnya kampanye pemilu fokus menggiring pemilih ke bilik suara.

Komunikasi politik dilaksanakan guna mengirim dan menerima umpan kepada masyarakat melalui sebuah isu politik. Isu politik ini memperkuat *image* kandidat, isu tersebut dapat berupa ideologi partai, program kerja, figur kandidat, visi misi, dan permasalahan yang diungkapkannya. Pada tahap tersebut masyarakat akan mulai terlihat kritis terhadap kandidat. Pembentukan harus dilakukan oleh partai politik dan tim pemenangan dengan menyelenggarakan pola kampanye politik yang tepat. Kampanye politik mempunyai jangka waktu yang panjang, dalam hal ini kampanye pemilu hanya menjadi bagian kecil dari kampanye politik. Kampanye politik lebih menguatkan *image* pasangan calon, sedangkan tahap selanjutnya kampanye pemilu fokus menggiring pemilih ke bilik suara.

Berdasarkan uraian diatas maka dalam penelitian ini kerangka pemikiran teoritis yang diajukan adalah sebagai berikut.

Gambar 1.2
Kerangka berfikir



Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dalam memenangkan suatu pemilihan kepala daerah langsung membutuhkan strategi pemenangan yang sistematis dan strategis dalam kampanye, sehingga memungkinkan pasangan calon dapat memenangkan Pemilu/kada Kabupaten Demak. Strategi yang telah disusun akan efektif dan maksimal apabila didukung mesin politik atau tim pemenangan dengan solid dan harmonis dalam bekerja.

1.6 Operasionalisasi Konsep

1.6.1 Strategi Pemenangan

Strategi pemenangan merupakan rencana atau konsep kegiatan yang disusun tim pemenangan pasangan calon dalam pemilihan umum langsung kepala daerah.

1.6.2 Pemilukada

Pemilihan langsung kepala daerah merupakan wujud dari demokratisasi oleh rakyat, baik gubernur, bupati, maupun walikota. Dengan adanya pemilukada, rakyat mempunyai peluang pada penentuan pemimpin selanjutnya, tanpa adanya sebuah paksaan.

1.6.3 Komunikasi Politik

Secara sederhana, komunikasi politik adalah komunikasi yang melibatkan pesan-pesan politik dan aktor-aktor politik, atau berkaitan dengan kekuasaan, pemerintahan, dan kebijakan pemerintah.

1.6.4 Faktor-Faktor Pemenangan

Faktor-faktor pemenangan pemilihan umum merupakan sesuatu yang dapat menjadikan kandidat atau partai politik dapat memperoleh kekuasaan, kemenangan atau sesuatu yang di inginkan.

1.7 Metode Penelitian

Menurut Sugiyono¹¹, metode penelitian merupakan cara ilmiah pada perolehan data dengan maksud dan kegunaan dengan aktivitas pengkajian berdasar pada keilmuan yang rasionalitas empiris dan sistemik. Metode merupakan aktivitas pengkajian yang dilaksanakan dengan logis dan nalar.

Jenis penelitiannya yaitu kualitatif deskriptif, merupakan penelitian dengan metode pendekatan studi. Pemusatan penelitian pada objek yang dipelajari, pada kasus yang didapatkan dari pihak terkait kemudian dikumpulkan dengan sumber. Data yang terkumpul selanjutnya dilakukan pengkajian dengan pendekatan deskriptif secara intensif.

Penelitian ini memakai pendekatan studi kasus tentang latar belakang dan kondisi peristiwa sekarang, dengan relasi dengan lingkungannya, pengelompokan instansi masyarakat. Hal ini ialah studi mendalam unit sosial dengan hasil pengkajian, penggambaran luas yang mendalam, yang dilakukan penelitian terbatas pada variabel.

Setiap pengkajian memiliki arah dan kegunaan, dengan tujuan 3 macam yaitu penemuan, pembuktian dan pengembangan. Penemuan berarti data yang diperoleh dari penelitian itu adalah data baru yang sebelumnya belum pernah diketahui. Pembuktian berarti data yang diperoleh itu digunakan untuk membuktikan adanya keragu-raguan terhadap informasi atau pengetahuan tertentu, dan pengembangan berarti memperdalam dan memperluas pengetahuan yang ada.

¹¹Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta hlm 46

1.7.1 Dasar Penelitian

Pengkajian ini memakai metode penelitian dengan pendekatan kualitatif, menurut Sugiyono¹² adalah yang maksudnya pada pemahaman peristiwa yang dirasakan contohnya perilaku, persepsi, motivasi dan tindakan.

Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif karena peneliti akan mengeksplorasi dan memahami analisis kemenangan Pasangan Muhammad Natsir dan Wakilnya Joko Sutanto pada Pemilu Kabupaten Demak Tahun 2015.

1.7.2 Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini mengambil lokasi di Kabupaten Demak. Pengambilan lokasi ini karena merupakan tempat berlangsungnya Pemilu Kabupaten Demak tahun 2015 yang dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2015. Penetapannya dengan kemudahan atau lancarnya objek sasaran pengkajian, dengan fokus permasalahannya.

1.7.3 Fokus Penelitian

Moleong¹³ mengidentifikasi terdapat dua tujuan yang ingin didapatkan yaitu perumusan masalah dan pemanfaatannya, dengan pembahasan studi dan fokus pada pemenuhan kriterianya, akan dipastikan dengan penelitian lapangan.

Fokus dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

¹² Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung : Alfabeta, 2008), hlm. 48

¹³ Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. REMAJA ROSDAKARYA, 2009), hlm. 93-94

- 1) Konsep strategi pemenangan yang digunakan pasangan calon bupati Muhammad Natsir dan wakil bupati Joko Sutanto pada Pemilu Kabupatn Demak Tahun 2015
- 2) Faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan strategi pemenangan yang digunakan pasangan calon bupati Muhammad Natsir dan wakil bupati Joko Sutanto pada Pemilu Kabupatn Demak Tahun 2015

1.7.4 Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah personal ataupun kelompok yang dapat memberikan informasi yang diperlukan pada pelaksanaan penelitian.¹⁴

Dalam menentukan informan dalam penelitian, penulis menentukan rujukan narasumber. Penelitian kualitatif ini sangat berkaitan dengan faktor kontekstual, sehingga memiliki maksud untuk menjangkau sebanyak mungkin informasi dari berbagai sumber, maka dari itu tujuannya adalah untuk merinci kekhususan yang ada dalam suatu konteks yang unik.

Narasumber yang menjadi subjek utama dalam penelitian ini antara lain: Koordinator Juru Kampanye yaitu Mudjiyono selaku dari tim pemenangan pasangan Muhammad Natsir dan Joko Susanto.

1.7.5 Jenis Data

Dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling*, yaitu pengambilan sampel non random berdasarkan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tersebut antara lain karena dianggap sebagai orang yang

¹⁴Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*(Jakarta : Rineka Cipta, 2006), hlm. 145

tahu tentang penelitian yang penulis kerjakan. Sehingga data yang terkumpul nantinya dapat memudahkan penulis dalam mengerjakan penelitiannya.

1.7.6 Sumber Data Penelitian

Dalam penelitian, terdapat dua sumber data penelitian yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

1) Sumber Data Primer: yaitu penelitian lapangan (*field research*).

Penelitian ini dilaksanakan dengan wawancara, dengan mengetahui kebenaran yang akan dilakukan penelitian, dengan tim pemenangan paslon Muhammad Natsir dan Joko Sutanto, KPUD Demak, calon kandidat.

2) Sumber Data Sekunder: yaitu penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu memahami dari buku, jurnal, regulasi yang ada, pelaporan, koran internet dan hal yang mempunyai korelasi dengan pengkajian ini.

1.7.7 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, terdapat metode yang biasa digunakan dalam mengumpulkan data, yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi.

1) Wawancara

Jenis wawancara yang dilaksanakan yaitu dengan langsung tidak terstruktur, berdasarkan pemikiran dan makna krusialnya pada relasi timbal balik untuk memperoleh sebuah informasi. Demikian dengan pemakaian wawancara tidak berstruktur, merupakan pemakaian bebas pada penggunaannya.

Adapun wawancara dalam penelitian ini akan dilakukan kepada:

1. Koordinator Juru Kampanye (Mudjiyono)
2. Calon Kandidat wakil bupati (Joko Sutanto)

2) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan dokumen resmi terkait dengan masalah penelitian, yang selaras dengan lainnya, seperti kegiatan kampanye pasangan Muhammad Natsir dan Joko Sutanto (jadwal dan susunan acara kampanye), visi misi dan program kerja pasangan Muhammad Natsir dan Joko Sutanto, dokumen tersebut didapatkan melalui tim sukses pasangan Muhammad Natsir dan Joko Sutanto. Dokumentasi lainnya yaitu laporan Pemilukada Kabupaten Demak tahun 2015, dokumen tersebut didapatkan melalui KPUD Demak. Dokumen pendukung lainnya seperti berita di media massa, penelitian yang relevan dengan masalah penelitian.

1.7.8 Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Apabila jawaban informan belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi hingga dianggap valid.

Menurut Sugiyono¹⁵, aktivitas dalam penganalisaan data kualitatif dilaksanakan dan berlangsung dengan berkala, dengan data yang cukup, yaitu pengumpulan, reduksi, penyajian dan verifikasi data.

Analisis data dalam penelitian mengenai “Strategi Pemenangan Pasangan Muhammad Natsir dan Joko Sutanto pada Pemilu Kabupat Demak Tahun 2015 dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan,

1) Analisis Sebelum di Lapangan

Analisis dilaksanakan pada hasil studi pendahuluan, data sekunder yang dipakai untuk penentuan fokusnya, sifatnya sementara dan akan berkembang di lapangan.

2) Analisis Data di Lapangan

a. Reduksi Data

Data yang didapatkan dengan penjumlahan yang tidak sedikit, maka dari itu perlu dicatat dengan benar melalui reduksi. Mereduksi data berarti merangkum dan memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal yang krusial, dengan tema dan polanya. Dengan demikian pemberian penggambaran yang rinci dan memudahkan peneliti melaksanakan pengumpulan data yang dibutuhkan.

b. Penyajian Data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk

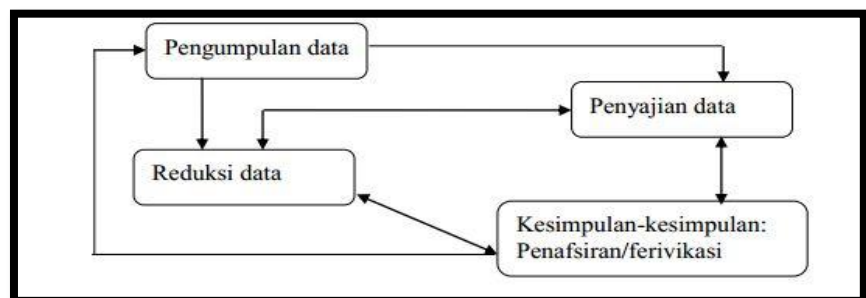
¹⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 246

uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart*, dan sejenisnya. Dengan menyajikan data maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

c. Verifikasi Data

Langkah ketiga adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang akan menjawab perumusan masalah, yang sifatnya tidak tetap dan selalu berkembang. Dapat ditarik kesimpulan bahwa pengkajian ini ialah temuan baru, belum pernah ada dengan obyek sebelumnya, belum jelas dan diteliti dengan jelas.

Konsep analisis data yang digunakan dalam mengolah data, dijelaskan dalam bagan berikut:



Sumber: Milles and Hubberman (dalam Sugiyono, 2014: 252)

1.7.9 Kualitas Data

Moleong¹⁶ mengatakan bahwa kualitas data dapat di lihat dari keabsahan data. Keabsahan data sudah sah jika memiliki empat kriteria, kriteria keabsahan data ada empat macam yaitu:

1) Kepercayaan (*kredibility*)

¹⁶ Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. REMAJA ROSDAKARYA, 2009), hlm. 324

- 2) Keteralihan (*tranferability*)
- 3) Kebergantungan (*dependibility*)
- 4) Kepastian (*konfermability*)

Dalam penelitian kualitatif ini peneliti menggunakan triangulasi untuk mengecek keabsahan data atau uji kredibilitas data. Teknik triangulasi adalah teknik keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan dan sebagai pembanding terhadap data. Menurut Moleong¹⁷ triangulasi data dapat dicapai dengan jalan:

- 1) Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara
- 2) Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi.
- 3) Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang.
- 4) Membandingkan apa yang dikatakan orang sewaktu diteliti dengan sepanjang waktu.
- 5) Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi dengan cara sebagai berikut yaitu:

- 1) Membandingkan hasil wawancara dari beberapa informan dengan pertanyaan yang sama. Hasil wawancara tersebut dioalah untuk didapatkan fakta yang sebenarnya.

¹⁷ Ibid, hlm. 178

2) Membandingkan hasil wawancara dengan isi dokumen yang berkaitan. Hasil wawancara informan dicocokkan kembali dengan bukti dokumen partai politik, dokumen pemerintah maupun studi yang relevan.